

**PERJUANGAN K. H. MAS MANSUR  
PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 1915-1945**

**RINGKASAN SKRIPSI**



**oleh:**

**Adnan Rafsanjani  
08407141004**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

# **PERJUANGAN K. H. MAS MANSUR PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 1915-1945**

**Oleh : Adnan Rafsanjani dan Danar Widiyanta, M.Hum.**

## **Abstrak**

Skripsi berjudul Perjuangan K.H. Mas Mansur pada masa Pergerakan Nasional Indonesia 1915-1945 merupakan hasil kajian tentang perjuangan K.H. Mas Mansur, khususnya tentang kegiatan sosial politiknya. Tujuannya untuk mengetahui gambaran tentang latar belakang kiprah K.H. Mas Mansur dalam pergerakan nasional dan dalam Muhammadiyah. Skripsi ini membahas lebih lanjut tentang peranan K.H. Mas Mansur dalam partai politik pada masa pergerakan nasional dan aktifitas serta hambatan yang pernah dialami oleh para ulama dalam berjuang mendirikan negara Indonesia melalui organisasi Muhammadiyah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa K.H. Mas Mansur seorang putra dari Surabaya yang memiliki peran dan perjuangan dalam menegakkan Islam dan dalam masa pergerakan nasional di Indonesia. K.H. Mas Mansur aktif mengikuti organisasi sosial keagamaan dan politik, antara lain Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, Mukhtar Alam al-Islam far'u al-Hindi al-Syarqiah (MAIHS), MIAI, Masyumi, PII, dan Putera. Perjuangan K.H. Mas Mansur juga tidak bisa dilepaskan dengan organisasi Muhammadiyah. K.H. Mas Mansur pernah menjabat sebagai Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya, Konsul Wilayah Jawa Timur dan puncaknya adalah sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Salah satu pemikiran K.H. Mas Mansur yang masih relevan dengan masa sekarang adalah 12 langkah Muhammadiyah. Langkah ini dicetuskan K.H. Mas Mansur saat menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Hal ini dilakukan sebagai jawaban dan antisipasi terhadap kondisi Muhammadiyah dan juga bangsa Indonesia yang masih berada dalam keterbelakangan.

**Kata Kunci:** *K.H. Mas Mansur, Pergerakan Nasional, 1915-1945.*

## **A. Pendahuluan**

Sejarah penjajahan di Indonesia, ideologi Islam merupakan suatu kekuatan yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam usaha perlawanan terhadap penjajah. Pemberontakan-pemberontakan besar terhadap penjajah seperti Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Padri (1821-1838), maupun Perang Aceh (1873-

1907),<sup>1</sup> semuanya dipelopori oleh pemimpin-pemimpin yang berideologi Islam. Akibatnya setiap gerakan Islam dianggap sangat membahayakan kedudukan pemerintah kolonial. Hal ini disebabkan karena sangat kurangnya pengetahuan pemerintah kolonial mengenai Islam, bahkan seringkali salah pengertian.<sup>2</sup>

Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik *westernisasi* dalam bidang budaya dan kristenisasi dalam bidang agama. Pemerintah kolonial berusaha mengembangkan kebudayaan Barat, sehingga orang Indonesia mau menerima kebudayaan Barat sebagai kebudayaan sendiri tanpa mengesampingkan kebudayaan asli. Dalam bidang agama pemerintah kolonial berusaha mengembangkan agama Kristen di Hindia Belanda. Untuk itu pemerintah kolonial banyak memberikan bantuan kepada zending-zending Kristen.<sup>3</sup>

Agama Islam di mata kolonial Belanda adalah bahaya yang mengancam kedudukannya. Oleh sebab itu pemerintah kolonial senantiasa menghalangi penyebaran agama Islam dengan mengeluarkan praturan-peraturan, di antaranya adanya peraturan tentang jamaah haji,<sup>4</sup> peraturan tentang pendidikan Islam,

---

<sup>1</sup>Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm. 133.

<sup>2</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 73.

<sup>3</sup>Deliar Noer, "The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942", terj. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 26-27.

<sup>4</sup>Jan S. Aritonang, *op.cit.*, hlm. 135.

ordonasi guru, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi bahaya perlawanan penduduk terhadap usaha-usaha penyebaran agama Kristen.<sup>5</sup>

Sejak kedatangan Snouck Hurgronje di Indonesia<sup>6</sup>, politik pemerintah kolonial terhadap Islam mulai diubah. Snouck Hurgronje berpendapat Islam sebagai ajaran agama dan Islam sebagai ajaran politik harus dibedakan. Selama umat Islam berpegang kepada Islam sebagai agama, mereka harus diberi kebebasan untuk menjalankan kewajibannya. Akan tetapi apabila Islam sudah menjadi alat agitasi politik, hendaknya pemerintah segera memberantasnya.<sup>7</sup>

Menurut Snouck Hurgronje, usaha kristenisasi di wilayah yang penduduknya berpegang teguh terhadap ajaran Islam justru akan menimbulkan penduduk wilayah tersebut merasa asing dengan pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu Snouck Hurgronje menyarankan agar pemerintah juga memberi perhatian pendidikan bagi umat Islam<sup>8</sup>, tanpa harus dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan kristenisasi. Snouck Hurgronje berkeyakinan bahwa cara ini akan mendorong rakyat Indonesia kelak mau menerima kebudayaan Barat dengan jalan asosiasi. Dengan jalan asosiasi inilah persoalan mengenai Islam akan dapat dipecahkan, dan pemahaman dalam aspek politik dan sosial yang disebabkan

---

<sup>5</sup>Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>6</sup>Jan S. Aritonang, *op.cit.*, hlm. 138.

<sup>7</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 73-74.

<sup>8</sup>Husain Haikal, "Dinamika Muhammadiyah Menuju Indonesia Baru". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 025, Tahun Ke-6, September 2000, hlm. 431.

karena kepercayaan dapat dihapuskan, bahkan secara tidak langsung akan bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen di kemudian hari.<sup>9</sup>

Sebagai akibat diterapkannya sistem politik tersebut, kaum terpelajar bangsa Indonesia mulai terkena pengaruh budaya Barat; individualisme, rasionalisme, dan nasionalisme telah mewarnai pola berpikir mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang beranggapan bahwa agama Islam itu kolot, Islam penghambat kemajuan, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Di lain pihak, agama Kristen mengalami perkembangan yang cukup pesat seperti terdapat di daerah Sulawesi Utara, Maluku, Timor Timur, Tapanuli, dan daerah-daerah lainnya.<sup>11</sup>

Akibat sistem kolonialisme yang diterapkan kepada bangsa Indonesia terlalu ketat, dominasi dalam bidang politik, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, *westrenisasi* kebudayaan, dan Kristenisasi, maka bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya mengalami kemerosotan dalam segala aspek kehidupannya, baik material maupun spiritual.

Pada masa yang bergelora seperti itulah K.H. Mas Mansur dilahirkan dan tumbuh besar. Dengan latar belakang keluarganya yang berasal dari para ulama, K.H. Mas Mansur kecil tidaklah kesulitan untuk menuntut ilmu dalam bidang keagamaan, bidang yang kemudian digelutinya seumur hidupnya dan menjadikannya seorang tokoh besar. K.H. Mas Mansur adalah seorang tokoh

---

<sup>9</sup>Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 183.

<sup>10</sup>Mahalli, "Kyai Haji Mas Mansur Perjuangan dan Pemikirannya", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN, 1985), hlm. 20.

<sup>11</sup>*Ibid.*

Islam modern dan pahlawan nasional<sup>12</sup> yang mempunyai cakrawala pemikiran ke depan. Sebagai seorang ulama dan politikus yang hidup dalam masa penjajahan, baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang yang penuh problematika membuat K.H. Mas Mansur tergugah untuk memperjuangkan nasib bangsanya dari penjajahan bangsa asing.

Kondisi Hindia Belanda yang tidak menentu pada masa penjajahan dan diskriminasi yang begitu kental membuat K.H. Mas Mansur berfikir dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan rakyat bumiputera pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, hal ini terbukti dari aktifitas yang ia lakukan baik di bidang sosial keagamaan maupun politik. Ia pernah mengikuti organisasi antara lain Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, Mukhtar Alam al-Islam far'u al-Hindi al-Syarqiah (MAIHS), MIAI, Masyumi, PII, dan Putera.<sup>13</sup>

## **B. Latar Belakang Kehidupan K.H. Mas Mansur**

K.H. Mas Mansur dilahirkan pada hari Kamis malam tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya, tepatnya di kampung Sawahan.<sup>14</sup> Kampung ini sekarang bernama kampung Kalimas Udik III. Ibunya bernama Raulah, seorang wanita kaya berasal

---

<sup>12</sup>Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.162 tahun 1964 tentang pengangkatan K.H. Mas Mansur menjadi pahlawan Nasional. Lihat juga Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1960 dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia kepada K.H. Mas Mansur.

<sup>13</sup>Amir Hamzah Wiryosukarto, ed, *Kyai Haji Mas Mansur Kumpulan Karangan Tersebar*, (Jakarta: Persatuan, 1992), hlm. x-xi.

<sup>14</sup>M. Yunus Anis dkk, *Kenalilah Pemimpin Anda*, (Yogyakarta: PP Muhamadiyah Majelis Pustaka, [t.t.]), hlm. 14.

dari keluarga pesantren Sidoresmo, Wonokromo, Surabaya. Ia adalah keturunan Sagipudin yang terkenal kaya raya.

Ayah K.H. Mas Mansur bernama K.H. Mas Ahmad Marzuki<sup>15</sup>, seorang pionir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur, ia berasal dari keturunan bangsawan Astatinggi Sumenep Madura. Semasa hidupnya ia dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Agung Ampel Surabaya.<sup>16</sup>

Dilihat dari garis keturunan ibu K.H. Mas Mansur berasal dari keturunan bangsawan dan ulama, sedangkan kalau dilihat dari pihak ayah, K.H. Mas Mansur berasal dari kalangan ulama yang terhormat dan terpandang. Keduanya berasal dari keluarga muslim yang taat, sehingga tidak mustahil apabila K.H. Mas Mansur menjadi ulama yang mempunyai ilmu yang luas dan berpandangan moderat.

Pendidikan pertama yang diterima K.H. Mas Mansur tentu saja dari ayahnya di Pesantren Sawahan, di sini K.H. Mas Mansur belajar ilmu *Nahwu* (tata bahasa Arab), dan *Sharaf* (perubahan bentuk dan makna dari bahasa Arab). Setelah memperoleh dasar-dasar ilmu agama dari ayahnya, maka pada tahun 1906 K.H. Mas Mansur dikirim belajar ke Pesantren Kademangan di Bangkalan Madura.<sup>17</sup>

Pada tahun 1908, K.H. Mas Mansur pergi belajar ke Mekkah bersama dengan K.H. Muhammad dan K.H. Wahab Hasbullah, namun pada tahun 1910

---

<sup>15</sup>Saleh Said, *Kyai Mas Mansur, Membuka dan Menutup Sejarahnya*, (Surabaya: Budi, [t.t.]), hlm. 5.

<sup>16</sup>Siti Maimunah, “K.H.Mas Mansur Biografi dan Pemikirannya Tentang 12 Langkah Muhammadiyah”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN, 1995), hlm. 13.

<sup>17</sup>Soebagijo I.N., *K.H. Mas Mansur Pembaharu Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 19.

timbul pergolakan politik di wilayah Hijaz. Syarif Husein memerintahkan kepada segenap orang asing untuk segera menyingkir atau meninggalkan kota suci itu.

K.H. Mas Mansur kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Setelah diterima di Universitas Al Azhar ia lalu memilih belajar di fakultas Al Din (Ilmu Agama) yang mempelajari ilmu-ilmu *Ubudiyah* dan *Siyasatul Islamiyah*. Selama belajar di Al Azhar K.H. Mas Mansur tinggal bersama para siswa lainnya yang berasal dari Melayu di ruang *Ruaq Al-Malayu*, asrama mahasiswa Melayu.<sup>18</sup> Selama jadi mahasiswa ini pula K.H. Mas Mansur pernah bertemu dengan Syeikh Rasyid Ridha, seorang murid Syeikh Muhammad Abduh.

Pada awal Agustus 1914 tatkala PD I pecah. Inggris menguasai Mesir dan menyatakan perang kepada kesultanan Ottoman. Situasi demikian bukan mustahil bisa mengganggu ketenangan belajar dan bahkan bisa pula mengancam keselamatan diri K.H. Mas Mansur jika ia masih bertahan di Mesir. Karena alasan itu, kemudian pada tahun 1915 ia meninggalkan Kairo menuju Mekkah dengan harapan bisa terus melanjutkan pelajarannya, namun situasi di kota suci ini pun tidak jauh berbeda dengan Kairo. Oleh karena merasa tidak betah lagi dengan situasi dan kondisi yang serba kacau. K.H. Mas Mansur segera meninggalkan Tanah Hijaz dan kembali di Tanah Jawa pada tahun 1915.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Darul Aqsha, *K.H. Mas Mansur (1896-1946) Perjuangan dan Pemikirannya*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 26-27.

<sup>19</sup>Amir Hamzah Wiryosukarto, *op.cit*, hlm. x



### C. Kiprah K.H. Mas Mansur dalam Organisasi Politik Masa Pergerakan Nasional

#### 1. K. H. Mas Mansur dalam Organisasi Politik

Pada tahun 1915, setibanya dari pengembaraannya menuntut ilmu ke Hijaz dan Mesir, K.H. Mas Mansur menjumpai kota kelahirannya, Surabaya dalam suasana penuh hiruk pikuk oleh semangat kebangsaan kaum revolusioner. Bung Karno yang sempat indekos beberapa lama di rumah H.O.S Cokroaminoto di kawasan Paneleh melukiskan situasi Surabaya saat itu sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan ribut, lebih menyerupai kota New York.<sup>20</sup> Di kota inilah H.O.S Cokroaminoto memimpin Central Sarikat Islam (CSI) yang terkenal dengan aksi-aksi radikalnya. Dalam suasana kota yang marak seperti itulah K.H. Mas Mansur memilih CSI sebagai lahan pengabdianya di bidang politik.<sup>21</sup>

Pada tahun 1920, bersama Fakih Hasyim dan Haji Ali yang sepaham, K.H. Mas Mansur membentuk *Ihya ussunnah*. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 17 April 1921, *Ihya ussunnah* mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri K.H. Ahmad Dahlan, dalam pertemuan itu diputuskan bahwa *Ihya ussunnah* akan menjadi cabang Muhammadiyah beberapa hari kemudian, surat kabar *Oetoesan Hindia* terbitan 27 April 1921 melaporkan Muhammadiyah Cabang Surabaya berdiri.<sup>22</sup> Dalam kesempatan itu K.H. Mas Mansur terpilih sebagai ketua umumnya.

---

<sup>20</sup>Darul Aqsha, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>21</sup>Amir Hamzah Wiryosukarto, *loc.cit.*

<sup>22</sup>Darul Aqsha, *op.cit.*, hlm. 54.

Kemudian K.H. Mas Mansur ikut bergabung dengan Indonesische Studie Club (ISC) yang didirikan di Surabaya pada tanggal 11 juli 1924. Kelompok studi ini bertujuan untuk menggugah kaum terpelajar supaya mempunyai kesadaran akan kewajiban terhadap masyarakat dan memperdalam pengetahuannya tentang politik.

Pada tahun 1927 Partai Serikat Islam mengalami keretakan. Masalah kooperatif dan nonkooperatif merupakan satu hal yang memang mengganjal hubungan antara Partai Sarikat Islam dan Muhammadiyah. Sikap Muhammadiyah yang bertahan kooperatif itu membuat Partai Sarikat Islam gerah dan menjatuhkan disiplin partai kepada anggota Muhammadiyah melalui kongresnya di Pekalongan pada Januari 1927.<sup>23</sup> Ini berarti anggota Muhammadiyah yang merangkap sebagai anggota Partai Sarikat Islam dihadapkan pada dua pilihan: ke luar dari Partai Sarikat Islam atau tetap menjadi anggotanya tetapi harus ke luar dari Muhammadiyah. K.H. Mas Mansur ke luar dari Partai karena dia beranggapan bahwa dengan sikap organisasi yang kooperatif akan memungkinkannya untuk lebih leluasa dan luwes berkiprah dalam memperjuangkan apa yang dicita-citakannya.

Pada tanggal 14 Desember 1938 di Solo lahirlah partai baru yang bernama Partai Islam Indonesia (PII). Di partai itu K.H. Mas Mansur duduk sebagai anggota.<sup>24</sup> Enam bulan setelah berdirinya PII, K.H. Mas Mansur dan R. Wiwoho

---

<sup>23</sup>Djarnawi Hadikusumo, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 55.

<sup>24</sup>A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1984), hlm. 131-132.

mewakili partai tersebut untuk mendirikan Gabungan Partai Indonesia (GAPI) bersama kaum pergerakan kebangsaan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1939.<sup>25</sup> Berdirinya GAPI selain dimaksudkan untuk mempersatukan partai politik di Indonesia, juga mempunyai tujuan pokok yaitu menuntut Indonesia berparlemen.<sup>26</sup> PII memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan GAPI berdasarkan prinsip musyawarah.

Dalam kongres PII pertama yang diadakan di Yogyakarta pada 11 April 1940 mencetuskan beberapa program yang menyangkut berbagai kepentingan rakyat Indonesia, meliputi masalah-masalah politik, agama, ekonomi, perpajakan, sosial, pengajaran dan kehakiman. Salah satu program PII yang paling menarik dan relevan dengan apa yang di perjuangkan bangsa Indonesia saat itu adalah di bidang politik, yaitu mengadakan sebuah Negara kesatuan Indonesia dibawah suatu pemerintahan pusat yang bersifat demokratis.<sup>27</sup>

Pada bulan September 1940 K.H. Mas Mansur mewakili MIAI duduk dalam dewan pimpinan Majelis Rakyat Indonesia (MRI) bersama dengan K.H. Wahid Hasyim, Wondoamiseno, Dr. Sukiman, dan Umar Hubeisy. MRI sendiri adalah sebuah badan perwakilan rakyat Indonesia yang bertujuan mencapai kesentosaan dan kemuliaan rakyat berdasarkan demokrasi menggantikan kongres Rakyat Indonesia.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 90.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup>A. K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 132-133.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 149.

Dalam rapat MRI pada tanggal 16 November 1941 yang beranggotakan 15 orang K.H. Mas Mansur terpilih menjadi ketua MRI, namun K.H. Mas Mansur tidak bersedia mengemban kepercayaan kongres tersebut. Kongres akhirnya memilih Mr. Sartono sebagai ketua MRI.<sup>29</sup> Majelis yang mengesahkan itu hanya berumur 3 bulan, lantaran PSII mengundurkan diri dari MRI maupun GAPI. Dengan demikian rencana kongres MRI pada Mei 1942 di Solo tidak terlaksana, bukan hanya karena pengunduran diri tersebut, tetapi juga karena Jepang telah menduduki Indonesia dua bulan sebelum rencana kongres.

K.H. Mas Mansur sendiri sejak bulan Agustus 1942 telah dipanggil *Gunseikan* (Kepala Pemerintahan Militer) ke Jakarta, pemanggilan ini berkaitan dengan rencana pemerintah militer Jepang untuk menanamkan pengaruhnya di Hindia Belanda. Jepang merencanakan untuk berhubungan lebih dekat lagi kepada para pemimpin masyarakat di Hindia Belanda agar bisa memberikan motivasi kepada rakyat untuk ikut berperan dalam mengerahkan baik dana maupun tenaganya. K.H. Mas Mansur pada masa ini juga mendapat bujukan dari Bung Karno untuk ikut membantu merumuskan nasib bangsanya, walaupun awalnya menolak ajakan itu, tetapi akhirnya K.H. Mas Mansur menerima ajakan tersebut karena ia merasa bertanggungjawab terhadap keselamatan bangsanya.<sup>30</sup>

Pada tanggal 9 Maret 1943 K.H. Mas Mansur bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara yang dijuluki empat serangkai menduduki posisi kunci dalam gerakan PUTERA yang diresmikan *Gunseikan* di Lapangan Ikada,

---

<sup>29</sup>Soebagijo I. N, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>30</sup>Saleh Said, *op.cit.*, hlm. 21.

Jakarta.<sup>31</sup> PUTERA baru mulai berjalan mulai tanggal 16 April 1943. PUTERA didirikan Jepang dengan maksud untuk memberikan kepuasan bangsa Indonesia di bidang politik, sekaligus sebagai alat untuk mengeksploitir kekayaan Indonesia bagi keperluan Perang Asia Timur Raya.<sup>32</sup> Perhatian dan minat masyarakat terhadap PUTERA untuk mencari berbagai bantuan dan keterangan ternyata di luar dugaan. Markas besar PUTERA yang mulai bekerja dengan kapasitas penuh tanggal 17 April 1942 sampai kewalahan.

Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1944 dibentuklah *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) yang bertujuan menghimpun segenap kekuatan di Jawa untuk mempercepat kemenangan akhir sesuai dengan amanat Panglima tertinggi Saiko Sikikan.<sup>33</sup> Terbentuknya *Jawa Hokokai* membuat empat serangkai mengumumkan peleburan PUTERA ke dalam badan baru itu, dan menyatakan berakhirlah sejarah dari organisasi PUTERA. Bung Karno kembali dilantik untuk menjadi ketua pada organisasi ini, sedangkan K.H. Mas Mansur, tertera sebagai salah seorang anggota pengurus umum wakil dari Masyumi.<sup>34</sup>

## 2. Pemikiran dan Perjuangan K.H. Mas Mansur

K.H. Mas Mansur selain aktif dalam berbagai organisasi politik, ia juga aktif dalam dalam masyarakat dan peduli terhadap nasib umat Islam di Nusantara.

---

<sup>31</sup>Darul Aqsha, *op.cit.*, hlm. 73.

<sup>32</sup>Noerhadi Soedarno, *POETERA (Pusat Tenaga Rakyat)*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 16.

<sup>33</sup>Soebagijo, *op.cit.*, hlm. 90.

<sup>34</sup>“Anggaran Dasar dan Pengurus Majelis Syuro Muslimin Indonesia”, dalam *Soeara MIAI*, no. 22-23 tahun 1943.

Ranah perjuangannya kemudian bisa dibagi dalam tiga cakupan, yakni perjuangannya dalam membangkitkan rasa kebangsaan, perubahan sosial keagamaan, serta dalam ranah jurnalistik.

K.H. Mas Mansur memanfaatkan bidang jurnalistik sebagai alat untuk menyebarluaskan berbagai gagasan dan pemikirannya kepada masyarakat di dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Media komunikasi pertama yang diterbitkan K.H. Mas Mansur adalah *Le Jinem*, pada tahun 1920 di Surabaya. Kemudian ia menerbitkan *Suara Santri* (1921)<sup>35</sup>, serta *Jurnal Etude dan prietair*, semua majalah itu membawakan suara kaum santri Surabaya.

*Le Jinem* maupun *Suara Santri* dijadikan K.H. Mas Mansur sebagai tempat untuk menumpahkan segenap isi hati dan cita-citanya berkenaan dengan perbaikan nasib umat dan bangsa. Bahasanya yang singkat padat dan mudah dipahami membuat ia mempunyai reputasi yang tinggi dalam bidang jurnalistik. Ia sempat menjadi redaktur dalam majalah *Kawan Kita Yang Tulus* di Surabaya, ia juga sempat menjadi pemimpin umum *Suara Muslimin Indonesia* saat Masyumi terbentuk pada akhir 1943.

K.H. Mas Mansur selain menerbitkan dan memimpin media sendiri, ia aktif pula menulis di berbagai media lain, seperti *Hindia Timur*, dan menjadi penyumbang tulisan untuk majalah-majalah siaran dan *Kentongan* (Surabaya), *Penganjur* dan *Islam Bergerak* (Yogyakarta), *Panji Islam* dan *Pedoman Masyarakat* (Medan), *Adil* (Surakarta), dan *Suara MIAI* (Jakarta).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Saleh Said, *op.cit.*, hlm. 38.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

#### **D. K.H. Mas Mansur Perannya dalam Muhammadiyah hingga tahun 1945**

##### **1. Kiprah K.H. Mas Mansur dalam Muhammadiyah**

Pada tahun 1916, ia pergi ke Yogyakarta untuk menemui K.H. Ahmad Dahlan. Pertemuan ini dimanfaatkan K.H. Ahmad Dahlan untuk memberi pengarahan kepada K.H. Mas Mansur yang menurut kesannya ia adalah seorang pemuda yang gelisah. Sebagai langkah awal K.H. Ahmad Dahlan memberikan penjelasan tentang *Surat Al-Ma'un*. Metode yang digunakan K.H. Ahmad Dahlan terasa ganjil di hadapan Mas Mansur. Keganjilan itulah yang menggugah K.H. Mas Mansur bertambah kagum pada K.H. Ahmad Dahlan. Metode yang digunakan K.H. Ahmad Dahlan seperti yang digambarkan K.H. Mas Mansur seperti berikut:

*“K.H. Ahmad Dahlan gemar sekali mengupas tafsir dan pandai pula tentang hal itu. Kalau menafsirkan sebuah ayat, beliau selidiki terlebih dahulu dalam tiap-tiap perkataan dalam ayat itu satu persatu. Beliau lihat kekuatan dan perasaan yang dikandung oleh perkataan itu di dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian barulah ia sesuaikan hingga keterangan beliau itu hebat dan dalam serta tepat. Inilah suatu sifat beliau yang melebihi ulama-ulama lainnya. Dan kesabaran beliau tentang hal ini memang luar biasa, membekas pada segala pekerjaan yang beliau tegakkan. Itu pulalah yang menetapkan hati dan pendirian beliau. Setelah beliau selidiki dan beliau pahami Al Qur'an sedalam-dalamnya kemudian beliau pandangan mata kepada umat, maka timbullah keyakinan sebagaimana pendirian beliau yang telah saya terangkan diatas tadi.”<sup>37</sup>*

Pada 1 November 1921, pengikut K.H. Ahmad Dahlan bersama-sama dengan pengikut K.H. Mas Mansur serta pengikut Pakih Hasyim mendirikan cabang Muhammadiyah di Surabaya. Sebagai ketuanya adalah K.H. Mas Mansur,

---

<sup>37</sup>Amir Hamzah Wiryosukarto, *op.cit.*, hlm. 188-189.

tokoh tersebut kemudian tercatat sebagai pembaharu yang banyak berhasil di Jawa Timur.<sup>38</sup>

Masuknya K.H. Mas Mansur dalam Muhammadiyah merupakan kebanggaan tersendiri bagi K.H. Ahmad Dahlan. K.H. Ahmad Dahlan mengatakan kepada kawan-kawannya di Yogyakarta: “*nah kini telah kita pegang sapu kawat dari Jawa Timur*”. Ungkapan itu memberi suatu pengertian bahwa K.H. Mas Mansur adalah seorang tokoh yang selalu sukses dalam usaha pemurnian ajaran Islam.<sup>39</sup>

Aktifitas K.H. Mas Mansur dalam Muhammadiyah membawa angin segar dan memperkokoh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu. Tangga-tangga yang dilalui K.H. Mas Mansur selalu dilalui dengan mantap. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya yakni setelah menjadi ketua cabang Muhammadiyah Surabaya, kemudian menjadi Konsul<sup>40</sup> Muhammadiyah wilayah Jawa Timur.<sup>41</sup> Puncak dari tangga tersebut adalah ketika K.H. Mas Mansur menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937-1943.

---

<sup>38</sup>Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 247.

<sup>39</sup>Djarnawi Hadikusumo, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>40</sup>Setelah kemerdekaan istilah “Konsul” dirubah menjadi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM). PWM berkedudukan di tiap-tiap provinsi. Siti Maimunah, *op.cit.*, hlm. 50.

<sup>41</sup>Surat Ketetapan dan Instruksi Consul Hoofdbestur Muhammadiyah untuk K.H. Mas Mansur yang diterbitkan oleh Hoofdbestur Muhammadiyah di Yogyakarta, 17 Maret 1935.



Ketika Mukhtar Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan pada tahun 1927, K.H. Mas Mansur mengusulkan agar Muhammadiyah membentuk Majelis Tarjih.<sup>42</sup> Alasan yang ia kemukakan adalah keberadaan ulama dalam Muhammadiyah mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya organisasi, agar dalam langkah perjuangannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena banyak pengaruh yang melingkupinya.<sup>43</sup> K.H. Mas Mansur-lah yang pertama kali menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih yang dibentuk pada 1928. Jabatan ini tetap dipegangnya sampai tahun 1937, saat ia diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah.

Pada kongres (Mukhtar) Muhammadiyah ke 26 K.H. Mas Mansur terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar. Pada kongres-kongres selanjutnya K.H. Mas Mansur selalu terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah sampai pada tahun 1943, ketika K.H. Mas Mansur menjadi salah seorang dari empat serangkai, jabatan Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah diserahkan kepada Ki Bagus Hadikusuma.<sup>44</sup>

Pada tahun 1937 dibentuk komisi masjid, badan wakaf, dan balai Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1938 ditetapkan untuk mendirikan Balai Kesehatan Muhammadiyah di tiap daerah dan menetapkan program

---

<sup>42</sup>Imron Rosyadi, "Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Tajdid*, Vol. 8, No. 2, Desember 2010, hlm. 166.

<sup>43</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 270. Lihat juga Mustafa Kemal Pasha dan A. Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Citra Kasa Mandiri, 2005), hlm. 58-59.

<sup>44</sup>Soebagijo, I.N, *op.cit.*, hlm. 84.

pemberantasan buta huruf. Pada tahun ini juga diadakan penggantian nama dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang sebelumnya tercantum kata-kata Hindia Belanda kemudian diubah menjadi Indonesia.<sup>45</sup>

Muhammadiyah juga telah menetapkan untuk tidak akan terjun dalam politik praktis, akan tetapi pengurus dan anggota Muhammadiyah diperbolehkan berkecimpung di dalamnya. Keputusan itu memberi angin segar bagi kalangan Muhammadiyah, sehingga banyak warga Muhammadiyah duduk dalam kepengurusan baik MIAI maupun Masyumi.<sup>46</sup>

Pada masa kepemimpinan K.H. Mas Mansur ada keputusan Muhammadiyah yang banyak membuahkan hasil demi kelancaran usaha Muhammadiyah, usaha itu adalah perangko amal.<sup>47</sup> Perangko amal adalah penambahan beberapa sen pada setiap harga penjualan perangko pos dan ditandai perangko amal Muhammadiyah. Hasil yang diperoleh dari perangko amal digunakan untuk pembangunan sarana ibadah, gedung sekolah, rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu, dan usaha sosial lainnya.<sup>48</sup>

Pada tanggal 5 Maret 1942 Jepang berhasil menduduki Yogyakarta. Pada awal pendudukan Jepang Muhammadiyah berjalan seperti biasa, tetapi setelah Jepang mengeluarkan UU no. 23 tentang pembubaran semua partai politik,

---

<sup>45</sup>Siti Maimunah, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>46</sup>M.T. Arifin, *Muhammadiyah: Potret yang Berubah*, (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan, 1990), hlm. 129.

<sup>47</sup>Soebagijo, I.N, *op.cit.*, hlm. 43. Lebih jelas tentang “perangko amal”, lihat *Suara Muhammadiyah* (No. 7 thn. XXIII-Agustus 1941), hlm. 137-155.

<sup>48</sup>Siti Maimunah, *op.cit.*, hlm. 57.

organisasi, serikat buruh dan perkumpulan lain di Indonesia, maka kegiatan Muhammadiyah mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena terputusnya hubungan antara Pengurus Besar dengan Muhammadiyah yang berada di luar Jawa karena banyaknya peperangan dan ketatnya pengawasan terhadap kegiatan pergerakan, terutama di bidang pendidikan.<sup>49</sup> Walaupun begitu Muhammadiyah tetap memperjuangkan amal usahanya.

Pada masa pendudukan Jepang wilayah Indonesia dibagi menjadi empat daerah militer yaitu: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa-Madura. Sebagai akibatnya Muhammadiyah yang sudah tersebar luas di wilayah Indonesia ikut terpecah. Muhammadiyah menanggapi keadaan ini dengan melakukan sidang Tanwir yang akhirnya memutuskan untuk mengambil tiga tindakan, yakni:

1. Apabila pecah perang Pasifik dan hubungan terputus antara PB Muhammadiyah dengan Muhammadiyah yang berada di luar Jawa, maka kelangsungan gerak Muhammadiyah diserahkan kepada Konsul-konsul PB Muhammadiyah di daerahnya masing-masing.
2. Di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dibentuk pimpinan Muhammadiyah Dairatul Kubra untuk mengkoordinasi Konsul masing-masing daerah.
3. Dairatul Kubra Sumatera dipimpin oleh AR Sutan Mansur, H. Hasan Corong untuk Kalimantan dan H.S.D. Muntu untuk Sulawesi termasuk kepulauan Indonesia bagian timur lainnya.

---

<sup>49</sup>Harry J Benda, *The Crescent and the Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*, terj. Daniel Dhakidae, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 140.

Keputusan ini dapat mencegah timbulnya kekosongan pimpinan, walaupun hubungan dengan Jawa terputus.<sup>50</sup>

## 2. Dua Belas Langkah Muhammadiyah

Ketika menjabat sebagai ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, K.H. Mas Mansur segera menyusun langkah bagi kelangsungan Muhammadiyah. Hasil itu berupa kerangka pedoman yang berisi 12 butir, sehingga kemudian terkenal dengan sebutan “12 langkah Muhammadiyah”.<sup>51</sup>

Proses terbentuknya 12 langkah Muhammadiyah bermula dari pengajian yang disampaikan oleh K.H. Mas Mansur kepada pengurus dan anggota Muhammadiyah. Pengajian itu bertempat di Gedung Muhammadiyah yang berada di belakang Masjid Agung di Kauman Yogyakarta dan dilaksanakan tiap senin malam.<sup>52</sup> 12 langkah Muhammadiyah itu adalah:

### 1. Memperdalam Masuknya Iman

*“hendaklah iman itu ditablighkan, disiarkan dengan selebar-lebarnya, yakni diberi riwayatnya dan diberi dalil buktinya, dipengaruhi dan digembirakan, sampai iman itu mendarah daging, masuk ditulang sum-sum dan mendalam di hati sanubari kita, sekutu-sekutu Muhammadiyah seumumnya.”*<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Un-Muh Malang, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, (Yogyakarta: Tiara Wacana dan Unmuh Malang Press, 1990), hlm. 40.

<sup>51</sup>Haedar Nashir, ed., *Dialog Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: BPK PP Muhammadiyah, 1992), hlm. 45.

<sup>52</sup>Soebagijo, I.N, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>53</sup>Mas Mansur, *Tafsir Langkah Muhammadiyah*, (Yogyakarta: H.B. Muhammadiyah Madjlis Taman Pustaka, 1939), hlm. 51.

## 2. Memperluas Faham Agama

*“hendaklah faham agama yang sesungguhnya itu dibentangkan dengan arti yang seluas-luasnya, boleh diujikan dan diperbandingkan, sehingga kita sekutu-sekutu Muhammadiyah mengerti perluasan agama Islam, itulah yang paling benar, ringan dan berguna, maka mendahulukanlah pekerjaan keagamaan itu”.*<sup>54</sup>

## 3. Memperbuahkan Budi Pekerti

*“hendaklah diterangkan dengan jelas tentang akhlak terpuji dan yang tercela serta diperbahaskannya tentang memakainya akhlak yang mahmudah dan menjauhkannya akhlak yang madzmudah itu, sehingga menjadi amalan kita ya seorang sekutu Muhammadiyah, kita berbudi pekerti yang baik lagi berjasa”.*<sup>55</sup>

## 4. Menuntun Amalan Intiqad

*“hendaklah senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri, segala usaha dan pekerjaan kita, kecuali diperbesarkan, supaya diperbaikilah juga. Buah penyelidikan itu dimusyawarahkan di tempat yang tentu, dengan dasar mendatangkan maslahat dan menjauhkan madlarat, sedang yang kedua ini didahulukan dari yang pertama”*<sup>56</sup>

## 5. Memperkuat Persatuan

*“hendaklah menjadikan tujuan kita juga, akan menguatkan persatuan organisasi dan mengokohkan pergaulan persaudaraan kita serta mempersamakan hak-hak dan memerdekakan lahirnya pikiran-pikiran kita.”*<sup>57</sup>

## 6. Menegakkan Keadilan

*“hendaklah keadilan itu ditegakkan semestinya, walaupun akan mengenai badan sendiri, dan ketetapan yang sudah seadil-adilnya itu dibela dan dipertahankan di mana juga.”*<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*

## 7. Melakukan Kebijakan.

*“dalam gerak kita tidaklah melupakan hikmah, hikmah mana hendaklah disendikan pada Kitabullah dan Sunnaterrasulillah. Kebijaksanaan yang menyalahi kedua pegangan kita itu, mestilah kita buang, karena itu bukan kebijaksanaan yang sesungguhnya.”<sup>59</sup>*

## 8. Memperkuat Majelis Tanwir

*“Sebab majlis ini nyata-nyata berpengaruh besar dalam kalangan kita Muhammadiyah dan sudah menjadi tangan kanan yang bertenaga di sisi Hoofdbestuur (PP) Muhammadiyah, maka sewajibnyalah kita perteguhkan dengan diatur dengan sebaik-baiknya.”<sup>60</sup>*

## 9. Mengadakan Konferensi Bagian

*“untuk mengadakan garis yang tentu dalam langkah-langkah bagian kita, maka hendaklah kita berikhtiar mengadakan konferensi bagian, umpama : konferensi bagian : penyiaran agama seluruh Indonesia dan lain-lain sebagainya.”<sup>61</sup>*

## 10. Mempermusyawarahkan Keputusan.

*“agar dapat keringanan dan permudahkan pekerjaan, hendaklah setiap ada keputusan yang mengenai kepala Majelis, dimusyawarahkan dengan yang bersangkutan itu lebih dahulu, sehingga dapat mentafidzkan dengan cara menghasilkannya dengan segera.”<sup>62</sup>*

## 11. Mengawasi Gerakan Dalam.

*“pemandangan kita hendaklah kita tajamkan akan mengawasi gerak kita yang ada dalam Muhammadiyah,. Yang sudah lalu, yang masih langsung dan yang bertambah (yang akan datang/berkembang).”<sup>63</sup>*

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*

## 12. Mempersambungkan Gerakan Luar

*“Kita berdaya upaya akan memperhubungkan diri dengan luar, lain-lain persyarikatan dan pergerakan di Indonesia, dengan dasar silaturahmi, tolong menolong dalam segala kebaikan, yang tidak mengubah asas-asas masing-masing, terutama perhubungan kepada persyarikatan dan pemimpin Islam”.*<sup>64</sup>

Maksud dari dicetuskannya 12 langkah Muhammadiyah yaitu sebagai garis kebijakan yang harus dilalui oleh setiap gerak dan amal usaha Muhammadiyah untuk memperpendek jalan untuk menuju tujuan Muhammadiyah dengan mengingat kemaslahatan sebagai organisasi penggerak.<sup>65</sup> Inti dari 12 langkah Muhammadiyah adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, sedangkan organisasi Muhammadiyah adalah sebagai wadah untuk merealisasikan dakwahnya.

### E. Kesimpulan

K.H. Mas Mansur dilahirkan pada penghujung abad ke XIX dalam suasana politik kolonial yang lebih persuasif. Secara genealogis ia masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga-keluarga keraton Sumenep, Madura, dan Cirebon. Selain adanya hubungan darah para bangsawan dalam darah K.H. Mas Mansur juga mengalir darah santri yang cukup disegani di Surabaya dan sekitarnya.

K.H. Mas Mansur adalah anak bangsa yang mampu tampil mengibarkan bendera Islam dan Indonesia dari kemelut kekolotan dan keterbelakangan akibat penjajahan dan tradisi yang melekat pada rakyat Indonesia. Sejak kecil ia

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Margono Puspo Suwarno, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Persatuan, 1986), hlm. 121.

menempa dirinya dengan belajar ke Pesantren dan ke luar negeri (Mekkah dan Mesir). Usahnya pun tidak sia-sia, dalam usia yang relatif muda yakni 19 tahun ia pulang dari luar negeri dengan membawa bekal ilmu yang luas dan dalam.

Setelah tiba di tanah air, ia menerjunkan diri di berbagai organisasi, baik dalam bidang sosial keagamaan maupun politik. Dalam bidang keagamaan, K.H. Mas Mansur merupakan tokoh penting dalam perkembangan umat Islam di Surabaya. K.H. Mas Mansur bersama K.H. Wahab Hasbullah dan H.O.S Cokroaminoto sering membuat kelompok diskusi yang membahas tentang kehidupan sosial beragama.

Dalam dunia politik, K.H. Mas Mansur ikut membidani lahirnya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Mas Mansur juga aktif menghimpun massa dengan mengajak orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal MIAI menjadi tertarik dan turut serta menjadi anggota MIAI. MIAI kemudian melebur dalam GAPI pada tahun 1939. Selain MIAI Mas Mansur juga aktif pula dalam PII, sebuah organisasi yang coraknya lebih berpolitik daripada MIAI, masuknya K.H. Mas Mansur dalam dunia politik ini sebagai langkah pembaharu ulama yang sebelumnya seakan-akan tabu untuk masuk dunia politik.

Bekal ilmu dari pesantren dan luar negeri ditambah dengan pengalaman berorganisasi, ia dapat memimpin Muhammadiyah dengan pemikiran yang segar dan kreatif. Awal pertemuannya dengan K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah menghantarkan K.H. Mas Mansur ikut serta dalam Muhammadiyah. Kekaguman K.H. Mas Mansur pada K.H. Ahmad Dahlan atas keluhuran budi bahasanya, keuletan dan kesabarannya dalam menafsirkan ayat Al



Quran dengan melihat isi teks yang ada dalam Al Quran kemudian dihadapkan pada realitas sosial yang ada menggugah hatinya untuk aktif dalam Muhammadiyah. Karir K.H. Mas Mansur dalam Muhammadiyah berjalan seperti tanpa hambatan, bermula dari Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya, Konsul Wilayah Jawa Timur dan puncaknya adalah sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah.

Salah satu pemikiran K.H. Mas Mansur yang masih relevan dengan masa sekarang adalah 12 langkah Muhammadiyah. Langkah ini dicetuskan K.H. Mas Mansur saat menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Hal ini dilakukan sebagai jawaban dan antisipasi terhadap kondisi Muhammadiyah dan juga bangsa Indonesia yang masih berada dalam keterbelakangan.

## **Daftar Pustaka**

### **Arsip dan Terbitan Resmi**

Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1960 dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia kepada K.H. Mas Mansur.

Surat Ketetapan dan Instruksi Consul Hoofdbestur Muhammadiyah untuk K.H. Mas Mansur yang diterbitkan oleh Hoofdbestur Muhammadiyah di Yogyakarta, 17 Maret 1935.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.162 tahun 1964.

### **Buku**

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.

Amir Hamzah Wiryosukarto, ed, *Kyai Haji Mas Mansur Kumpulan Karangan Tersebar*, Jakarta: Persatuan, 1992.

- A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1984.
- Benda, Harry J, *The Crescent and the Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*, terj. Daniel Dhakidae, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Darul Aqsha, K.H. *Mas Mansur (1896-1946) Perjuangan dan Pemikirannya*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Deliar Noer, "The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942", terj. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Djarnawi Hadikusumo, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Haedar Nashir, ed., *Dialog Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: BPK PP Muhammadiyah, 1992.
- Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Margono Puspo Suwarno, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Persatuan, 1986.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Mas Mansur, *Tafsir Langkah Muhammadiyah*, Yogyakarta: H.B. Muhammadiyah Madjlis Taman Pustaka, 1939.
- M.T. Arifin, *Muhammadiyah: Potret yang Berubah*, Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan, 1990.
- Mustafa Kemal Pasha dan A. Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Citra Kasa Mandiri, 2005.
- M. Yunus Anis dkk, *Kenalilah Pemimpin Anda* Yogyakarta: PP Muhamadiyah Majelis Pustaka, [t.t.]
- Noerhadi Soedarno, *POETERA (Pusat Tenaga Rakyat)*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Saleh Said, *Kyai Mas Mansur, Membuka dan Menutup Sejarahnya*, Surabaya: Budi, [t.t.]

Soebagijo I.N., *K.H. Mas Mansur Pembaharu Islam di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah Un-Muh Malang, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, Yogyakarta: Tiara Wacana dan Unmuh Malang Press, 1990.

### **Jurnal**

Husain Haikal, "Dinamika Muhammadiyah Menuju Indonesia Baru". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 025, Tahun Ke-6, September 2000.

Imron Rosyadi, "Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Tajdid*, Vol. 8, No. 2, Desember 2010.

### **Skripsi**

Mahalli, "Kyai Haji Mas Mansur Perjuangan dan Pemikirannya", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN, 1985.

Siti Maimunah, "K.H.Mas Mansur Biografi dan Pemikirannya Tentang 12 Langkah Muhammadiyah", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN, 1995.

### **Majalah**

"Anggaran Dasar dan Pengurus Majelis Syuro Muslimin Indonesia", dalam *Soeara MIAI*, no. 22-23 tahun 1943.

"Perangko Amal", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 7 thn. XXIII-Agustus 1941.